

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam, Panji, 2019, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, 2022, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fakhriah, Efa Laela, 2019, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Harahap, Yahya, 2014, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ishaq,H., 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Komisi Yudisial RI, 2014, *Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi*, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno 2008, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Libery, Yogyakarta
- MD, Mahfud, 2010, *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ramulyo, Idris, 2002, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Saija, Ronald, Roger Letsoin, 2016, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Deepublish, Yogyakarta
- Sanjaya, U.H., A.R. Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Seri Buku Ajar*, Gama Media, Yogyakarta
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Siregar, Bismar, 1994, *Bunga Rampai Hukum dan Islam*, Grafikatama Jaya, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2021, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Sugeng, Bambang, Sujayadi, 2013, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen litigasi*, Kencana, Jakarta.

Sutantio, R., I. Oeripkartawinata, 2019, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Pratik Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung

B. Artikel Jurnal

Christiawan, Rio, “Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi”, *Jurnal Yudisial*, Vol.11, No.3, Desember 2018.

Hakim, Dayang D.A, Ivan Z.L., Orin G.A., “Penerapan Asas *The Binding Persuasive of Precedent* Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika”, *Risalah Hukum*, Vol.17, No.2, Desember 2021.

Indrayanti, Kadek Wiwik, “Penetapan dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia yang Berkeadilan dan Berkemanusiaan”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Lizwary, Karina, Wahyuni Safitri,”Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Dengan Adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1400K/PDT/1986”,*Yuriska Jurnal Hukum*,Vol.8, No.1,September 2017.

Pahlefi, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 Terhadap Anak dari Perkawinan Siri”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No. 1, Februari 2015.

Rahmi, Diana, “Subjek Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Tentang Peradilan Agama”, *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol.14, No.2, Januari 2015.

Sadjono, Agus “Hukum Perjanjian: Antara Norma dan Pelaksanaannya”, *Hukum dan Pembangunan*, No.3, Juni 1994

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Lathifah, Anthin, Rokhmadi, Sahidin, Mashudi, 2013, ”Perkawinan Beda Agama Di Jawa Tengah”, Laporan Penelitian Kolektif, Kementerian Agama RI, Semarang

Pramudiyanti, Julia Indah, 2019, “Perkawinan Beda Agama Menurut Pemahaman Jemaat GKJ Sidomukti: Suatu Tinjauan Kritis Dalam Pembangunan Jemaat”, Skripsi, Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

D. Internet

Rahayu, Lisye Sri, "Ma'ruf Amin Tegaskan Fatwa MUI Larang Nikah Beda Agama", <https://news.detik.com/berita/d-6151335/maruf-amin-tegaskan-fatwa-mui-larang-nikah-beda-agama>, diakses 21 Januari 2023.

Wahyuni, Dela Sri, "Pluralisme Hukum Dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah dan Tantangan Ke Depan", <https://leip.or.id/pluralisme-hukum-dalam-pembangunan-hukum-indonesia-masalah-dan-tantangan-ke-depan-2/>, Diakses 29 Oktober 2023.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.

Undang-Undang No.32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura (Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 1954, Tambahan Lembaran Negara Nomor 694).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3019).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184).

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1118 Tahun 2019).

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 2).

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2012 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 89)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991)

F. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 31 Januari 2023.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 perihal Kasasi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/Pdt.P/1986 Perihal Permohonan Perkawinan Beda Agama Andi Vonny Gani P, 20 Januari 1989

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 717/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel Perihal Perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan Beda Agama Pemohon Salvius Pelatin Witak, 2 November 2021.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 902/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel Perihal Perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan Beda Agama Pemohon TP.Stella Maris, 14 Desember 2021.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel Perihal Perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan Beda Agama Pemohon Lusia Dwi Astari, 12 Mei 2022.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel
Perihal Perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan Beda Agama
Pemohon Devina Renata Sianipar dan Jaka Nugraha, 8 Agustus 2022.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1017/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel
Perihal Perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan Beda Agama
Pemohon Dinda Ratna dan Andra Wowor, 24 Januari 2023.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel
Perihal Perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan Beda Agama
Pemohon Diandro Archivelli dan Ingrid Anggi, 25 Januari 2023.

G. Sumber Lain

Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/2019 Tanggal 30
Januari 2019.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang
Perkawinan Beda Agama, 28 Juli 2005.

Konferensi Waligereja Indonesia, 2016, Kitab Hukum Kanonik Edisi Resmi Bahasa
Indonesia (Revisi II), Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta.